



Policy and Implementation Gaps in Sustainable Natural Resource Management in Indonesia: A Literature Review

**Bonaraja Purba¹, Dean Setiyana², Aprianti hananya Sigukguhi³, Nazwa Az Zahro⁴,
Hilkia Natasya BR Ginting⁵**

Ilmu Ekonomi, Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Sumatra Utara, Indonesia.

Email: bonarajapurba@unimed.ac.id, deansetiyana1@gmail.com, apriantihananya248@gmail.com,
nazwaazzahro518@gmail.com, hilkianatasyabrginting@gmail.com

ABSTRACT

Natural resource management in Indonesia faces various challenges in achieving sustainability, particularly related to resource utilization, environmental protection, governance, and the economic and social interests of communities. Natural resource management policies have been developed to support sustainable development, but their implementation still faces various challenges at the practical level. This study aims to analyze policies and implementation of sustainable natural resource management in Indonesia and to identify various challenges that affect their effectiveness. This study uses a literature review method by analyzing scientific articles and previous studies discussing natural resource management, environmental policies, governance, forestry, mining, water resources, and community-based management. The results show that sustainable natural resource management is influenced by policy effectiveness, governance quality, institutional capacity, community involvement, and consistency in policy implementation. Previous studies also indicate that gaps remain between policies and their implementation in practice. Therefore, strengthening institutional coordination, supervision, community participation, and policy implementation consistency is necessary to support sustainable natural resource management in Indonesia.

Keywords: natural resources, sustainable development, environmental policy, governance, policy implementation.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan Indonesia karena berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, serta keseimbangan lingkungan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam, seperti hutan, pertambangan, sumber daya air, pesisir, dan sumber daya laut. Pemanfaatan sumber daya tersebut memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pembangunan, tetapi pemanfaatan yang tidak disertai dengan prinsip keberlanjutan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, konflik pemanfaatan sumber daya, dan ketimpangan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, tetapi juga bagaimana kebijakan dan tata kelola mampu menjaga keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang.

Konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut semakin penting karena kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam sekaligus kebutuhan masyarakat. Suratin et al. (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam terbaru di Indonesia menghadapi kebutuhan perubahan pendekatan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam perlu diarahkan tidak hanya pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan menjadi salah satu instrumen utama dalam mengatur pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Namun, keberadaan kebijakan belum secara otomatis menjamin tercapainya pengelolaan yang berkelanjutan. Erbaugh dan Nurrochmat (2019), melalui kajian terhadap 218 dokumen kebijakan kehutanan Indonesia pada periode 1999–2016, menemukan adanya perubahan kebijakan menuju perlindungan hutan, tetapi proses *policy layering* juga memungkinkan kebijakan lama tetap berjalan sehingga praktik yang tidak berkelanjutan masih dapat berlangsung. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya terletak pada formulasi kebijakan, tetapi juga pada konsistensi dan efektivitas implementasinya.

Aspek tata kelola juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sumber daya alam. Sayer et al. (2021) menunjukkan bahwa berbagai program restorasi lanskap di Indonesia menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian kebijakan dan kepentingan yang berbeda antaraktor. Mereka juga menunjukkan bahwa kerja sama pada berbagai tingkat dapat membantu meningkatkan hasil restorasi. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan membutuhkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Rakatama dan Pandit (2020) melakukan tinjauan terhadap 86 penelitian mengenai skema perhutanan sosial di Indonesia dan menemukan bahwa manfaat ekonomi menjadi salah satu aspek utama yang dibahas, sementara tantangan sosial dan lingkungan masih perlu mendapat perhatian. Pambudi (2020) juga menunjukkan bahwa perkembangan perhutanan sosial merupakan bagian dari kebijakan pembangunan yang berupaya menggabungkan aspek ekonomi dan ekologis melalui pemberian akses pengelolaan kepada masyarakat.

Selain kehutanan, tantangan keberlanjutan juga terlihat pada sektor pertambangan dan sumber daya lainnya. Hairi et al. (2023), misalnya, menunjukkan bahwa pengelolaan proyek nikel di Indonesia memerlukan kerangka tata kelola pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, tidak hanya kegiatan ekstraksi. Sementara itu, Widiyatno dan Asdak (2023) menekankan pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan dalam kaitannya dengan hidrologi dan mitigasi perubahan iklim. Penelitian Karso (2025) juga menunjukkan bahwa masyarakat adat masih menghadapi kerentanan dalam tata kelola sumber daya alam akibat tumpang tindih klaim lahan, regulasi yang terfragmentasi, dan keterbatasan keterwakilan dalam pengambilan keputusan.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah berkembang dalam berbagai sektor dan perspektif. Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada sektor tertentu, seperti kehutanan, perhutanan sosial, pertambangan, sumber daya air, atau pengelolaan berbasis masyarakat. Selain itu, sebagian penelitian menekankan aspek kebijakan, sementara penelitian lainnya lebih menyoroti tata kelola, lingkungan, atau kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai temuan penelitian agar dapat diperoleh

gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara kebijakan, implementasi, tata kelola, dan keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aloysius Suratin, Suyud Warno Utomo, Dwi Nowo Martono, dan Koosuke Mizuno	2023	Pengelolaan sumber daya alam terbarukan dan transisi rendah karbon	Diperlukan perubahan pendekatan pengelolaan SDA untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan keberlanjutan
2	Jeffrey T. Erbaugh dan Dodik Ridho Nurrochmat	3019	Perubahan kebijakan kehutanan Indonesia 1999–2016	Terjadi perubahan kebijakan menuju perlindungan hutan, tetapi <i>policy layering</i> memungkinkan praktik lama tetap berlangsung
3	Jeffrey Sayer, Agni Klintuni Boedhihartono, James Douglas Langston, Chris Margules, Rebecca Anne Riggs, dan Dwi Amalia Sari (2021)	2021	Tata kelola restorasi lanskap hutan	Implementasi restorasi menghadapi ketidaksesuaian kebijakan dan kepentingan antaraktor; kolaborasi diperlukan untuk memperbaiki tata kelola
4	Ari Rakatama dan Ram Pandit	2020	Perhutanan sosial di Indonesia	Perhutanan sosial memberikan peluang ekonomi, tetapi tantangan sosial dan lingkungan masih perlu diperhatikan
5	Alfian Pambudi	2020	Perkembangan dan implementasi kebijakan perhutanan sosial	Perhutanan sosial menjadi instrumen pemban menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan
6	Widiyatno Widiyatno dan Chay Asdak	2023	Pengelolaan hutan berkelanjutan, hidrologi, dan perubahan 7iklim	Pengelolaan hutan berkelanjutan penting untuk menjaga fungsi hidrologis dan mendukung mitigasi perubahan iklim
7	A. Junaedi Karso	2025	Tata kelola SDA dan masyarakat adat	Masyarakat adat menghadapi kerentanan akibat tumpang tindih klaim lahan, fragmentasi regulasi, dan keterbatasan partisipasi
8	Robert Siburian, Herman Hidayat, dan Fanny Henry Tondo	2025	Pengelolaan sumber daya sungai berbasis pengetahuan tradisional	Pengetahuan lokal dapat menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat
9	Niko Ardyanto, Christine Wulandari, Samsul Bakri, dan Indra	2026	Efektivitas implementasi kebijakan perhutanan	Implementasi kebijakan perhutanan sosial perlu dievaluasi berdasarkan

	Gumay Febryano		sosial	capaian kebijakan dan kondisi pelaksanaannya
10	Muhammad Imam Akbar Hairi, Diki Zukriadi, Lingga Angling Wulung, dan Nur Elfi Husda	2023	Tata kelola proyek nikel berkelanjutan	Tata kelola perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

Sumber daya alam merupakan sumber daya yang berasal dari lingkungan dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun kehidupan masyarakat. Sumber daya alam Indonesia meliputi sumber daya hutan, pertambangan, air, pesisir, laut, serta berbagai sumber daya hayati lainnya. Pengelolaan sumber daya alam pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya tersebut.

Dalam konteks pembangunan, pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan hubungan antara manusia dan lingkungan. Suratin et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menghadapi kebutuhan perubahan pendekatan untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa aspek sosial dan ekonomi serta tata kelola menjadi bagian penting dalam memahami permasalahan pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian kebijakan dan tindakan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kepentingan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan merupakan pendekatan yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam pada saat ini tidak boleh mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam pengelolaan hutan, misalnya, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan tutupan hutan, tetapi juga mempertahankan fungsi ekologisnya. Widiyatno dan Asdak (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan berkaitan dengan fungsi hidrologis serta kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim. Mereka juga mengaitkan pengelolaan hutan dengan kebijakan *FOLU Net Sink 2030* dan pencapaian target perubahan iklim Indonesia.

Suratin et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia perlu mengalami perubahan pendekatan sejalan dengan kebutuhan pembangunan rendah karbon. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan SDA tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan lingkungan dan perubahan arah pembangunan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini melihat pengelolaan SDA berkelanjutan melalui empat aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Keempat aspek tersebut digunakan untuk memahami apakah kebijakan pengelolaan SDA telah mampu menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam merupakan instrumen pemerintah yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan, perlindungan, pengawasan, dan pelestarian sumber daya alam. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan, program, strategi, maupun mekanisme pengelolaan yang bertujuan mengarahkan pemanfaatan SDA agar sesuai dengan kepentingan pembangunan dan keberlanjutan.

Kebijakan yang baik tidak hanya dilihat dari keberadaan peraturan, tetapi juga dari konsistensi dan kemampuannya dalam mengarahkan praktik di lapangan. Erbaugh dan Nurrochmat (2019), melalui analisis terhadap 218 dokumen kebijakan kehutanan Indonesia periode 1999–2016, menemukan adanya perubahan kebijakan menuju perlindungan hutan. Namun, proses *policy layering*, yaitu penambahan kebijakan baru tanpa sepenuhnya mengubah atau menghapus kebijakan sebelumnya, memungkinkan praktik lama tetap berlangsung.

Temuan tersebut penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan SDA tidak cukup hanya dengan membuat kebijakan baru. Kebijakan harus memiliki keterkaitan yang jelas, tidak saling bertentangan, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga yang bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan merupakan tahap ketika kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam bentuk program, kegiatan, atau tindakan nyata. Dalam pengelolaan sumber daya alam, implementasi menjadi penting karena keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kondisi pelaksanaan di lapangan.

Penelitian Ardyanto et al. (2026) mengenai implementasi kebijakan perhutanan sosial menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perluasan akses administratif masyarakat terhadap kawasan hutan, tetapi juga oleh hasil sosial-ekologis yang dihasilkan. Penelitian tersebut menggunakan *meta-analysis* berbasis dokumen dan *systematic literature review* terhadap implementasi perhutanan sosial periode 2016–2024. Hasilnya menunjukkan pentingnya tata kelola kolaboratif dan kebijakan adaptif untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan SDA perlu dilihat dari beberapa indikator, yaitu konsistensi pelaksanaan kebijakan, kapasitas kelembagaan, pengawasan, keterlibatan masyarakat, koordinasi antaraktor, serta hasil sosial dan lingkungan.

Tata kelola sumber daya alam berkaitan dengan bagaimana pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam. Tata kelola yang baik diperlukan karena pengelolaan SDA melibatkan berbagai kepentingan yang terkadang dapat saling bertentangan.

Suratin et al. (2023) menunjukkan bahwa aspek tata kelola sosial-ekonomi menjadi bagian dominan dalam memahami persaingan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam tata kelola SDA. Dalam kebijakan perhutanan sosial, misalnya, pemerintah memberikan ruang legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Penelitian Ardyanto et al. (2026) menunjukkan bahwa keberhasilan program tersebut berkaitan dengan tata kelola kolaboratif, pemberdayaan masyarakat, serta kemampuan kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan.

Dengan demikian, tata kelola dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya memengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode **tinjauan literatur (literature review)**. Penelitian dilakukan dengan menelaah dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia, khususnya yang membahas kebijakan, implementasi, tata kelola, kehutanan, pertambangan, sumber daya air, serta pengelolaan berbasis masyarakat. Sumber

data penelitian berupa artikel ilmiah yang diperoleh dari jurnal nasional dan internasional yang relevan dan dapat ditelusuri melalui basis data akademik. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian, relevansi terhadap kebijakan dan implementasi pengelolaan sumber daya alam, serta kontribusinya terhadap pembahasan keberlanjutan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi dan pengumpulan literatur, seleksi sumber berdasarkan relevansi, pembacaan dan pencatatan informasi penting, pengelompokan temuan berdasarkan tema, kemudian sintesis hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dan analisis tematik, dengan mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta kesenjangan dari penelitian terdahulu. Analisis tersebut digunakan untuk memetakan hubungan antara kebijakan, implementasi, tata kelola, serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Metode tinjauan literatur dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kebijakan dan implementasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan di Indonesia mencakup aspek kebijakan, implementasi, tata kelola, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Berbagai kebijakan telah dikembangkan untuk mengarahkan pemanfaatan SDA agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut antara lain ketidakkonsistenan kebijakan, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Perkembangan kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia menunjukkan adanya perubahan dari pendekatan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya menuju pendekatan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Suratin et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam memiliki peran penting dalam mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon. Sementara itu, Erbaugh dan Nurrochmat (2019) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan kehutanan di Indonesia telah mengalami perkembangan, tetapi kebijakan lama masih dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak selalu langsung menghasilkan perubahan dalam praktik pengelolaan SDA.

Dalam bidang kehutanan, Pambudi (2020) menunjukkan bahwa kebijakan perhutanan sosial diarahkan untuk meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Rakatama dan Pandit (2020) juga menunjukkan bahwa perhutanan sosial dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan sosial dan lingkungan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan SDA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Ardyanto et al. (2026) juga menekankan pentingnya melihat efektivitas perhutanan sosial berdasarkan hasil yang dicapai, termasuk manfaat sosial dan ekologis, bukan hanya dari sisi pelaksanaan administratif.

Aspek tata kelola dan kelembagaan menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengelolaan SDA. Sayer et al. (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemulihan lanskap di Indonesia menghadapi berbagai kepentingan yang saling berhubungan serta kewenangan yang dapat tumpang tindih. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antaraktor dan antar lembaga. Pada sektor pertambangan, Hairi et al. (2023)

menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya nikel perlu memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan SDA sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan dalam menjalankan kebijakan, melakukan pengawasan, dan mengoordinasikan kepentingan berbagai pihak.

Dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan, pengelolaan SDA tidak dapat hanya dinilai berdasarkan keuntungan ekonomi. Rakatama dan Pandit (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, tetapi tetap terdapat tantangan dalam menjaga aspek lingkungan. Widiyatno dan Asdak (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan juga berkaitan dengan fungsi hidrologi dan upaya mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, Siburian, Hidayat, dan Tondo (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan lokal masyarakat dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya sungai. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan SDA yang berkelanjutan perlu menggabungkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mempertimbangkan kondisi dan pengetahuan masyarakat setempat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian terdahulu, tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Kebijakan yang telah disusun belum selalu dapat diterapkan secara optimal karena adanya perbedaan kondisi antarwilayah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi, serta kepentingan ekonomi yang terkadang lebih dominan dibandingkan kepentingan lingkungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan masyarakat adat dalam proses pengelolaan SDA masih perlu diperkuat agar kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Oleh karena itu, penguatan pengelolaan SDA berkelanjutan perlu dilakukan melalui kebijakan yang lebih konsisten, koordinasi antar lembaga yang lebih baik, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dan masyarakat adat juga perlu diperhatikan karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan kondisi sumber daya di wilayahnya. Penilaian keberhasilan kebijakan juga perlu memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga ketersediaan SDA bagi generasi mendatang.

Secara keseluruhan, hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia telah berkembang ke arah yang lebih berkelanjutan, tetapi masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Keberhasilan pengelolaan SDA tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan, tetapi juga pada tata kelola, kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraktor, partisipasi masyarakat, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan SDA berkelanjutan perlu dilakukan secara terpadu agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia telah berkembang ke arah pengelolaan yang lebih berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Namun, perkembangan kebijakan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang optimal. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi antaraktor, perbedaan kondisi antarwilayah, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan masyarakat adat.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan SDA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kemampuan lembaga dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pemanfaatan sumber daya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsistensi kebijakan, koordinasi antar lembaga, kapasitas kelembagaan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan membandingkan implementasi kebijakan pada sektor atau wilayah yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai efektivitas kebijakan pengelolaan SDA berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyanto, N., Wulandari, C., Bakri, S., & Febryano, I. G. (2026). Evaluating the effectiveness of social forestry: A meta-analysis of policy documents and implementation. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 7(2), 129–141. <https://doi.org/10.18196/jpk.v7i2.27416>
- Budi, Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Mardiana, R. (2021). Implementation gap of social forestry policy: The case of HKm Beringin Jaya and HTR Hajran. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27(1), 1–12. <https://doi.org/10.7226/jtftm.27.1.1>
- Erbaugh, J. T., & Nurrochmat, D. R. (2019). Paradigm shift and business as usual through policy layering: Forest-related policy change in Indonesia (1999–2016). *Land Use Policy*, 86, 136–146. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.04.021>
- Hairi, M. I. A., Zukriadi, D., Wulung, L. A., & Husda, N. E. (2023). Governance for sustainable development for nickel project in Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 27(2), 164–177. <https://doi.org/10.22146/jkap.87023>
- Karso, A. J. (2025). Natural resources governance and the vulnerability of indigenous communities in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 7, 1601480. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1601480>
- Maryudi, A., Sahide, M. A. K., Daulay, M. H., Yuniati, D., Syafitri, W., Sadiyo, S., & Fisher, M. R. (2022). Holding social forestry hostage in Indonesia: Contested bureaucracy mandates and potential escape pathways. *Environmental Science & Policy*, 128, 142–153. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.11.013>
- Pambudi, A. S. (2020). The development of social forestry in Indonesia: Policy implementation review, 2007–2019. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.11>
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111, 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Sayer, J., Boedhihartono, A. K., Langston, J. D., Margules, C., Riggs, R. A., & Sari, D. A. (2021). Governance challenges to landscape restoration in Indonesia. *Land Use Policy*, 104, 104857. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104857>
- Siburian, R., Hidayat, H., & Tondo, F. H. (2025). Management practice of the tributaries (Saka) of Kahayan River based on traditional knowledge by the community in Central

- Kalimantan, Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 66(3), 289–298. <https://doi.org/10.1111/apv.12448>
- Suratin, A., Utomo, S. W., Martono, D. N., & Mizuno, K. (2023). Indonesia's renewable natural resource management in the low-carbon transition: A conundrum in changing trajectories. *Sustainability*, 15(14), 10997. <https://doi.org/10.3390/su151410997>
- Widiyatno, W., & Asdak, C. (2023). Sustainable forest management from hydrology and climate change mitigation perspectives. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.22146/jik.v17i1.6904>
- Heripan, H., Taqwa, R., Priadi, D. P., Milantara, N., & Harbi, J. (2019). Implementation of social forestry policy around the Meranti Sungai Merah Protection Forest Area. *Sriwijaya Journal of Environment*, 4(1), 42–51. <https://doi.org/10.22135/sje.2019.4.1.42>
- Nurwansyah, N., Kartodihardjo, H., & Ichwandi, I. (2024). Social forestry in West Sumatra: A review on regulation and its implementation in Hutan Nagari Salibutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 18(2), 153–166. <https://doi.org/10.22146/jik.v18i2.13098>
- Permadi, D. B., Lutviah, H., Yuwono, T., & Rohman. (2022). Discretion and interpretation of Indonesian social forestry (ISF) by local forest bureaucrats: Evidence from DI Yogyakarta Province. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 16(2). <https://doi.org/10.22146/jik.v16i2.2409>